

PENGATURAN MENGENAI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

Chomariyah

ABSTRAK : Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan diperlukan guna mengatasi permasalahan mendasar bagi masyarakat nelayan. Selama ini telah banyak dikeluarkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dibawah kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Keberhasilan PNPM Mandiri Kp sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaannya. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan maka dapat dijadikan panduan untuk melakukan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Program ini dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pendapatan masyarakat nelayan, pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan.

Keywords : *Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Kebijakan Pemerintah, Pengembangan Kewirausahaan Nelayan.*

Correspondens : *Dosen Magister Hukum-Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Jl Arif Rahman Hakim 150 Surabaya 60111, E-mail: chomariah@hangtua.ac.id*

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat nelayan selama ini telah banyak dilakukan tetapi program tersebut biasanya dilakukan oleh lembaga perencana program tanpa melibatkan secara langsung masyarakat yang menjadi sasaran program (bersifat *Top-down*). Walaupun program pemberdayaan tersebut didasarkan pada proses peninjauan sesuai dengan kebutuhan di lapangan (*need assessment*) yaitu masyarakat nelayan tetapi hal ini hanya dilaksanakan berdasarkan suatu survey ataupun penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat nelayan secara optimal.

Berbagai kritik terhadap pola program pemberdayaan yang bersifat *Top-down* dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam pola tersebut sering terjadi ketidakcocokan antara para peneliti/pemrakarsa program dengan para

pelaksanan program / masyarakat nelayan;

2. Keterlibatan masyarakat nelayan dalam program yang dilaksanakan berupa *paket* masyarakat hanya sekedar sebagai pelaksana tetapi tidak merasa sebagai pemilik program;
3. Keterlibatan masyarakat nelayan hanya sebagai pelaksana, kurang mendidik ketrampilan dan kurang menjamin keberlanjutan program, sebab ide selalu datang dari pemrakarsa, baik berupa ketrampilan, pengkajian, perencanaan maupun pengorganisasian akan tetap dimiliki oleh pihak pemrakarsa.

Kritik itulah yang menimbulkan beragam pemikiran terhadap metode/pendekatan pelaksanaan program yang bersifat pendampingan (*partisipatif*). Apabila masyarakat nelayan dapat dilibatkan secara menyeluruh dalam proses pelaksanaan program

pemberdayaan maka program tersebut akan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Rasa kepemilikan terhadap program akan lebih tinggi, juga terhadap ketrampilan-ketrampilan akan berpindah kepada masyarakat nelayan.

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan, tetapi belum mencapai hasil yang optimal (Kusnadi, PKN, 2004 : 15), misal program pemberian bantuan kredit bergulir yang sering kali macet, program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program modernisasi perikanan dengan bantuan perahu bermotor/ mesin perahu juga tidak sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Hal serupa juga terjadi terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), yang berusaha mengembangkan keuangan mikro (*micro banking*) di masyarakat nelayan (Kusnadi, PKN, 2004:32), ternyata dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pemberdayaan masyarakat yang tepat dan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan?
- b. Bagaimanan model penguatan kelembagaan dan penguatan pendanaan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Menganalisa *bentuk pendampingan* yang digunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nelayan agar dapat memberi manfaat dalam mensejahterakan masyarakat nelayan *secara berkelanjutan*.
- b. Menggali tindakan lanjutan dari LPM sebagai bentuk penguatan

kelembagaan agar program pendampingan tetap berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian buka berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan.

Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah (*grassroots*) yang umumnya dinilai tidak berdaya.

Maksud Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan masyarakat agar diperoleh perbaikan tatanan kelembagaan.
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sumberdaya – sumberdaya yang ada sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang seimbang dari aspek ekologis dan ekonomis. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya kemandirian

masyarakat dalam berusaha dengan kelembagaan yang tangguh sehingga masyarakat sejahtera.

Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat terutama *grass root* dalam pembangunan selama 50 tahun terakhir ini adalah adalah sesuatu yang artificial, sebatas slogan, direkayasa dan dipaksakan. Dengan pola sentralistik maka partisipasi masyarakat kurang mendapatkan tempat. Pada akhir tahun 1990-an, program pemberdayaan masyarakat sebagai ganti program pembinaan masyarakat mulai mendapat tempat karena bukti dan pengalaman empiris di banyak Negara. Program pemberdayaan menjadi *new mainstream* dalam pembangunan, dikembangkan dan diproses oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang berpangkal dan berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah (*bottom up planning*) yang berarti masyarakatlah yang mengusulkannya, serta program yang bersifat *advokasi* karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat sendiri. Dengan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan:

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
3. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya hubungan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya local (*resource based*), memiliki pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat local (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepatguna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).
5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi atau dasar hubungan ekonomi antar daerah.
6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi dengan wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada.

Prinsip Dasar Pemberdayaan

- a. Prinsip pendekatan kelompok masyarakat
- b. Prinsip keserasian
- c. Prinsip kepemimpinan dari mereka sendiri
- d. Prinsip pendekatan kemitraan
- e. Prinsip swadaya
- f. Prinsip belajar sambil bekerja
- g. Prinsip pendekatan keluarga

Arah Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah :

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan, daya

saing, dan partisipasi masyarakat kelas bawah.

2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peranserta masyarakat, dalam arti semakin memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambil keputusan pembangunan.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat dalam arti semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

- a. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- b. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-

fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.

Penguatan Kapasitas

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik.

- b. Pengembangan kemampuan dalam permodalan

Kegiatan pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan masyarakat mampu menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta berusaha dalam sistem pasar. Penguatan modal usaha dapat diberikan dalam bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman tergantung kemampuan kelompok. Dana ini dikelola secara langsung oleh kelompok untuk dipergunakan secara bersama.

- c. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat

Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan kepada petani di bidang ekonomi secara berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya, dan mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian. Di samping itu pembinaan diarahkan agar kelompok mampu mengelola usaha bersama melalui kursus-kursus,

pelatihan teknis, manajemen, kewirausahaan, dan magang sehingga mampu mengembangkan usahanya melalui kegiatan temu usaha, pameran dalam rangka memasarkan hasil usahanya.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Penciptaan lapangan pekerjaan alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*).
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna,
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar,
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Nelayan sering merekomendasikan bentuk suatu pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan *Bottom-up* sebab akan diketahui untuk merekomendasikan merupakan salah satu masyarakat marginal yang seringkali tersisih dari akomodasi kebijakan pemerintah. Problema yang dihadapi masyarakat nelayan sangatlah kompleks mulai dari yang bermuara pada minimnya penghasilan mereka sampai masalah sumber daya ikan. Masyarakat nelayan pun mengalami masa-masa paceklik yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Pemberdayaan yang menggunakan pendekatan bawah ke atas (*bottom up*) pada prinsipnya, harus menghiraukan aspirasi atau upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan juga harus memperhatikan posisi struktural dalam konteks masyarakat yang lebih luas. (Wahyono, 2004)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, misal Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan Harga BBM (selanjutnya disingkat PAM-DKB) dilandasi pada adanya krisis yang merupakan dampak kenaikan harga BBM. Pendekatan dari PAM-DKB ini adalah program penyelamatan dengan pola pemberdayaan dan kebersamaan yang partisipatif bagi keluarga miskin (gakin) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Program ini memang tidak dikhususkan pada masyarakat Nelayan tetapi didalamnya termasuk keluarga miskin Nelayan yang juga terkena dampak terhadap kenaikan harga BBM. Keberadaan Program PAM-DKB diharapkan dapat diselenggarakan dengan akseptabel, transparan, akuntabel, terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*).

Ruang lingkup kegiatan PAM-DKB terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Penciptaan Lapangan Kerja;
2. Bidang Penguatan dan Perluasan Pasar;
3. Bidang Investasi;
4. Bidang Padat Karya Desa.

Penciptaan lapangan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi gakin memperoleh peluang kerja dalam kelompok melalui usaha memproduksi/menghasilkan sesuatu, baik dengan memakai alat maupun tidak dengan menyediakan dana kegiatan. (Petunjuk Teknik Operasional PAM-DKB, 2006)

a. Sasaran kegiatan penciptaan lapangan kerja antara lain usaha :

1. Pembuatan paving

Pembuatan paving merupakan kegiatan untuk memproduksi bahan perkerasan yang terbentuk atas pasir/sirtu, semen dan bahan tambahan lain melalui proses pemadatan dengan alat khusus. Hasil produksi umumnya digunakan untuk perkerasan jalan, pekarangan atau

lapangan, baik di kota maupun di pedesaan.

2. Pengolahan limbah plastik (perkotaan)

Pengolahan limbah plastik merupakan kegiatan mengolah limbah plastik dengan perajangan untuk menghasilkan potongan-potongan kecil yang hampir seragam melalui alat khusus untuk dipasarkan kepada pihak industri plastik sebagai bahan baku. Pengumpulan limbah plastik menyerap tenaga kerja pemulung namun hanya cocok di perkotaan yang memiliki banyak limbah plastik;

3. Pembibitan

Pembibitan merupakan kegiatan untuk menyediakan bibit tanaman yang baik (sesuai dengan standar pembibitan yang telah ditetapkan) untuk keperluan reboisasi lahan kritis maupun bibit tanaman yang menghasilkan berbagai jenis buah sebagai tanaman halaman atau kebun gakin yang merupakan cadangan makanan tambahan untuk pemenuhan gizi. Bagi yang memilih kegiatan pembibitan untuk keperluan reboisasi lahan kritis harus sudah mengetahui kepastian adanya lahan kritis yang dapat ditanami dan jenis tanaman yang dipersyaratkan melalui instansi yang menangani lingkungan hidup/instansi terkait termasuk akses menuju lokasi tersebut dengan berbagai kesulitannya;

4. Peternakan dan Perikanan

Peternakan dan Perikanan merupakan kegiatan untuk membudidayakan, menggemukan ternak dan ikan yang sesuai dengan potensi alam setempat dan dapat menghasilkan dalam kurun waktu singkat untuk menopang ekonomi keluarga serta salah satu alternatif sumber perbaikan gizi masyarakat. Pemilihan jenis ternak dan ikan dikonsultasikan kepada instansi Pertanian dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan jenis bibit unggul dan wabah penyakit yang sering terjadi seperti flu burung dll;

5. Pembuatan pupuk organik

Pembuatan pupuk organik merupakan kegiatan memproduksi pupuk

dari bahan organik hewan, tumbuhan, sampah dan atau limbah lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pembuatan pupuk ini cocok untuk daerah yang mempunyai peternakan sapi, kerbau, ayam, tumbuhan tertentu yang memenuhi syarat dll;

6. Produk potensial Desa/Kelurahan

Produk potensial Desa/Kelurahan merupakan kegiatan memproduksi suatu barang/bahan yang bahan bakunya tersedia dalam jumlah banyak, hasil produksinya dibutuhkan dalam jangka pendek dan menengah oleh berbagai pihak dan biasa dikerjakan dengan baik di kalangan warga setempat seperti kerajinan bambu, pembuatan batu bata, pembuatan kerupuk dll;

7. Kegiatan penciptaan lapangan kerja lainnya

Kegiatan penciptaan lapangan kerja lainnya merupakan kegiatan usaha produksi selain dari yang tersebut di atas yang banyak dikerjakan di kalangan gakin dan hasilnya dapat dipasarkan dengan mudah, yang dalam proses produksinya menyerap tenaga kerja.

Usulan Dana PAM-DKB yang tidak dibenarkan antara lain :

- a. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor Desa, tempat ibadah dan gedung fasilitas pemerintah lainnya;
- b. Pembiayaan kegiatan politik;
- c. Pembelian senjata, bahan peledak, bahan-bahan lain yang merusak lingkungan dan mengancam ketertiban dan keamanan;
- d. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak dibawah usia kerja.

Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan informasi program kepada pengelola program di berbagai tingkatan, dengan tujuan menjelaskan program, membangun komitmen dan dukungan berbagai pihak serta membahas rencana tindak lanjut. Pelatihan merupakan upaya memantapkan

pengenalan, pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap materi sosialisasi dengan memberi contoh praktek administrasi, keuangan dan atau kegiatan secara langsung dilatih oleh; Komite Propinsi Tim Pendamping Propinsi Dinas/Instansi/Lembaga/Supplier/Swasta terkait Pendamping Kabupaten/Kota/Kecamatan dan atau Pihak lainnya yang berkompeten.

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilaksanakan pada 5 tingkatan yaitu :

1. Tingkat Propinsi;
2. Tingkat Bakorwil;
3. Tingkat Kabupaten/Kota;
4. Tingkat Kecamatan;
5. Tingkat Desa/Kelurahan.

b. Pelatihan

Pelatihan terbagi dalam 3(tiga) jenis yaitu:

1. Pelatihan Administrasi Pengelolaan Program;
2. Pelatihan Administrasi Keuangan;
3. Pelatihan Teknis Kegiatan.

ad (b.1) Pelatihan Administrasi Pengelolaan Program

Pelatihan Administrasi Pengelolaan Program diberikan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Tingkat Kecamatan;
3. Tingkat Desa/Kelurahan.

ad (b.2) Pelatihan Administrasi Keuangan

1. Pelatihan Administrasi Keuangan diberikan pada 2 (dua) tingkatan yaitu tingkat
2. Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

ad (b.3) Pelatihan Teknis Kegiatan.

Pelatihan Teknis Kegiatan diberikan pada 2 (dua) tingkatan yaitu :

1. Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Tingkat Desa.

PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan PAM-DKB adalah

- (1) Akseptable, bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan/dana dilaksanakan berdasarkan

kesepakatan antar pelaku sehingga memperoleh dukungan semua pihak.

- (2) Transparan, bahwa pengelolaan kegiatan/dana dilakukan secara terbuka, sehingga dapat terkendali dan terwujud. (Tranparancy)
- (3) Akuntable, bahwa pengelolaan/dana harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat. (Accountability and Responsible)
- (4) Keterpaduan, bahwa kegiatan antar bidang/sub bidang, Pokgakin, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota saling menunjang, saling melengkapi, saling mengisi, untuk berhasilnya PAM-DKB. (Integrited)
- (5) Keberlanjutan, bahwa kegiatan dan hasil kegiatan berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang.(Sustainable)

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan masing – masing diberikan bantuan dana pembinaan berupa Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dengan penggunaan dan rincian sebagai berikut :

- a. Tim Koordinasi dengan arah penggunaan yaitu : biaya rapat, perjalanan dinas, alat tulis kantor, biaya pelatihan dan pembuatan laporan.
- b. Dana BOP Kecamatan sebesar Rp. 6.000.000,- digunakan untuk : biaya rapat, perjalanan dinas, alat tulis kantor, honor bendahara, biaya pelatihan, pembuatan laporan, dan untuk PKK Kecamatan sebesar Rp. 500.000,- untuk mendukung kegiatan PAM-DKB di Tingkat Kecamatan
- c. Dana BOP Desa/Kelurahan sebesar Rp. 3.500.000,- digunakan untuk : biaya rapat, perjalanan dinas, honor bendahara, biaya pelatihan, alat tulis kantor, pembuatan laporan, PKK Desa/Kelurahan sebesar Rp. 500.000,- LPMD/LPMK/Lembaga lain sebagai Unit Pengelola Program

(PAM-DKB) Rp.500.000,- yang digunakan untuk mendukung kegiatan PAM-DKB di Desa/Kelurahan.

PAM-DKB dilaksanakan dengan menggunakan dana dalam bentuk pendampingan (cost sharing) APBD Kabupaten/Kota.

Menurut Kusnadi, keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan secara tepat dan efektif sesuai dengan budaya masyarakat setempat akan lebih cepat menguatkan kedudukan sosial masyarakat bersangkutan.(Kusnadi, AKN, 2003:40). Dalam PAM-DKB juga demikian, meskipun program ini memang dikhususkan karena krisis ekonomi berkaitan dengan dampak kenaikan harga BBM tetapi juga diharapkan dapat membantu memberdayakan masyarakat pesisir khususnya Nelayan. Memang sebaiknya program pemberdayaan tersebut didukung oleh pelaksana program yang bisa bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi yang memadai (kusnadi, AKN,2003:41).

Program Penguatan Kelembagaan

Berkaitan dengan rumusan masalah kedua maka Program Penguatan yang ditawarkan bertujuan terhadap pengembangan dan keberlanjutan program antara lain :

1. Peningkatan mutu, dengan memperhatikan kesehatan,kebersihan dan kemasan Produk, juga dengan menggunakan teknologi tepat guna (alat pemotongan kerupuk);
2. Penyandang dana lanjutan, dengan melakukan negosiasi ke Pemda ataupun ke individu penyandang dana;
3. Pemasaran, dengan kontak person ataupun pengelolaan jaringan melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli terhadap pengembangan program;
4. Mengikuti pameran ataupun bazar guna mengenalkan produk bersangkutan.

Pembangunan masyarakat Nelayan yang berkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraannya memang harus ada dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal teknologi yang digunakan. Program penguatan yang baru saja diluncurkan berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat nelayan adalah Untuk meningkatkan realisasi *Kredit Usaha Rakyat* (KUR) sektor kelautan dan perikanan, *Kementerian Kelautan dan Perikanan* (KKP) telah melakukan upaya terobosan. Diantaranya, melakukan relaksasi regulasi perbankan. Dimana lembaga perbankan harus mulai melenturkan aturannya agar bisa mengakomodir keterbatasan UMKM pelaku usaha sektor KP dalam memenuhi persyaratan kredit. Menurut Laporan KKP sampai akhir September 2013, realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri usaha mikro dan kecil, secara kumulatif mencapai Rp 764,9 milyar atau 0,6 % dari realisasi nasional yang mencapai Rp 126,41 Triliun. Sedangkan jumlah debitur sebanyak 7.327 debitur atau 0,1 % dari jumlah debitur nasional yang mencapai 9.419.201 debitur. KKP juga memaksimalkan peran lembaga perantara kredit seperti Bank Perkreditan Rakyat Pesisir (BPR Pesisir), Unit Simpan Pinjam, Swamitra Mina dan Grameen Pesisir. Lembaga ini merupakan hasil *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir* (PEMP) melalui skema linkage guna meminimalisasi persyaratan kredit yang harus dipenuhi pelaku usaha. KKP juga telah menerapkan skim khusus bagi sektor KP, mengingat adanya karakteristik khusus, baik sosial maupun ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan serta siklus usaha yang sangat dipengaruhi iklim dan musim. KKP juga terus mendorong pemberian dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai pendamping KUR dilokasi sentra-sentra nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar produk perikanan dan tambak garam rakyat. Upaya yang ditempuh KKP untuk percepatan realisasi

KUR juga telah diterbitkannya Pedoman Umum KUR sektor kelautan dan perikanan melalui Surat Kepmen No. KEP.27/MEN/2012. Kepmen ini telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan serta telah dialokasikan anggaran melalui Dana Dekonsentrasi pada seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Kebijakan nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat yang diwujudkan melalui *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan oleh Menkokesra. KKP melaksanakan PNPM Mandiri KP bertujuan untuk mempersiapkan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kemampuan usahanya melalui dana stimulan. Diharapkan pasca mendapat dana bantuan program, mereka bisa mengakses dana program, seperti *Kredit Ketahanan Pangan dan Energi* (KKPE) dan KUR. “Diharapkan setelah itu, secara mandiri mereka mampu mengakses dana sumber permodalan atau lembaga keuangan seperti perbankan,” jelasnya.

Menurut Sharif, untuk menggerakkan perekonomian di wilayah pesisir, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan swasta, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber-sumber permodalan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah meluncurkan 2 (dua) Kredit Program yaitu KKPE dan KUR. Tujuannya untuk meningkatkan investasi dan modal kerja bagi pelaku UMKM-K termasuk pelaku usaha Kelautan dan Perikanan. Salah satu kredit program yang mendapat sambutan baik dari pihak perbankan adalah KUR. Hal ini ditandai

dengan banyaknya Bank Pelaksana yaitu 7 Bank Nasional dan Semua Bank Daerah. KKP melalui *Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (KP3K) telah membina sebanyak 276 *Lembaga Keuangan Mikro* (LKM). Terdiri dari 6 Unit BPR Pesisir, 113 Swamitra Mina Baik Online maupun Offline, 25 Baitul Qirodl dan 112 USP serta 23 Unit Grameen Bank. Semua LKM tersebut merupakan LKM yang berada dibawah Koperasi dengan jumlah koperasi sebanyak 269 Unit Koperasi Pesisir/Perikanan. Selain LKM, Koperasi Pesisir/Perikanan ini juga memiliki beberapa unit usaha lain. Diantaranya SPDN, Kedai Pesisir, Regenerasi Nelayan, dan *Pusat Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (P3MP). Koperasi-Koperasi tersebut merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berdomisili ditengah-tengah komunitas masyarakat pesisir dengan berbagai bidang usaha. Terutama untuk nelayan, pembudidaya ikan pengolah dan pemasar ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Hal ini merupakan LKM Potensial yang dapat dimanfaatkan Lembaga Keuangan baik bank maupun Non Bank sebagai mitra kerja. Terutama sebagai lembaga linkage dalam penyaluran kredit program dan kredit lainnya yang ada pada lembaga keuangan. Sebagai contoh, tahun 2013 LKM pesisir telah mengakses dana dari LPDB sejumlah Rp 48,525 Milyar untuk 28 Koperasi.

KESIMPULAN

KKP berkomitmen untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat nelayan dengan pencapaian program PNPM-KP seperti: (1) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). tahun 2013 dengan masa produksi yang relatif pendek, akibat oleh anomali cuaca, PUGAR masih mampu memproduksi sebesar 1.041.472,55 ton garam, hal ini tidak mempengaruhi terhadap pasokan garam konsumsi nasional karena produksi

garam 2013 dan stok garam tahun 2012 masih mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi tahun 2013 sebesar 1.527.170 ton dan masih surplus sebagai cadangan semester I tahun 2014 sebesar 387.693 ton. Tahun 2013 PUGAR telah menyentuh 3.521 kelompok garam. (2) Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang merupakan program PNPM-KP antara lain tersusunnya 66 dokumen rencana pengembangan desa pesisir yang diwujudkan dengan terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan/atau lingkungan (pembangunan jalan, sarana air bersih, MCK, rehab rumah, penanaman vegetasi, pengelolaan sampah, shelter penampungan serta pembuatan bronjong) pada 22 Kabupaten/Kota.

Saran

Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dibawah kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Keberhasilan PNPM Mandiri Kp sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaannya. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan maka dapat dijadikan panduan untuk melakukan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Program ini dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pendapatan masyarakat nelayan, pengembangan kewirausahaan masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, Rohmin, 2004, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, PT. Prandya Paramita, Jakarta.
- Huizer, Gerrit, 1997, Participatory Action Research And People's Participation: Introduction And Case Studies, Third World Centre, University of Nijmegen The Netherlands. (<http://www.fao.org/AVAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/Ppdirect/Ppre0030.htm>).
- Kusnadi, 2003, Akar Kemiskinan Nelayan, LkiS, Yogyakarta.
- , 2004, Polemik Kemiskinan Nelayan, LkiS, Yogyakarta.
- , 2006, Konflik Sosial Nelayan, (Kemiskinan dan perebutan sumber dayaalam), LkiS, Yogyakarta.
- , 2009, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir, Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Ar-Ruzz media, Yogyakarta.
- Mikkelsen B.ritha, 2011, Metoda Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Pudjiraharjo, Widodo J., 2006, Qualitatif Approach for Scientific Inquiry, Materi perkuliahan S3 Logika dan Metoda Sains, Universitas Airlangga (tidak dipublikasikan), Surabaya.
- Pemerintah Propinsi Jatim, Komite PAM-DKB, 2006, Petunjuk Teknik Operasional PAM-DKB Bidang Penciptaan Lapangan Kerja, Jawa Timur.
- Solihin, Akhmad, 2005, Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Indonesia, Humaniora, Bandung.
- Wahyono, Ary, 2004, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Media Presindo, Jakarta.